

Identitas Muslim Priangan Sebagai Landasan Promosi Global

Tika Tazkya Nurdyawati

Adam Mickiewicz University

*Corresponding author, e-mail: tiknur@st.amu.edu.pl

Abstrak

Pararelitas falsafah Sunda dan agama Islam di Jawa Barat merumuskan terminologi “Muslim Priangan”. Tidak hanya merujuk secara historis, identitas ini dapat dimanfaatkan menjadi realisasi fungsi diplomasi yaitu promosi/branding daerah. Di era globalisasi dan masifnya keterlibatan aktor lokal ke ranah-ranah internasional telah memberi ruang proaktif bagi daerah untuk berpegang teguh pada kearifan lokal. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi akulturasi Islam-Sunda Muslim Priangan terhadap rekognisi Jawa Barat di panggung internasional. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan merujuk pada studi dan literatur terdahulu. Temuan artikel ini memetakan bahwa dengan perspektif Diplomasi kontemporer dalam dinamika Hubungan Internasional, Identitas Muslim Priangan Jawa Barat dapat dimanfaatkan sebagai instrumen promosi terlebih dengan ikhtiar proaktif pemerintah dalam menjalin kooperasi dengan entitas luar negeri berlandaskan visi Islamik.

Kata Kunci: Diplomasi; Identitas; Jawa Barat; Muslim Priangan

Abstract

The parallelity between Sundanese and Islamic philosophy in West Java formulated the term "Muslim Priangan". Not only historically, but this identity could also be used to implement the function of diplomacy, namely regional promotion/branding. In the era of globalization and the massive involvement of local actors in international arenas, it has provided a proactive space for subnational regions to stick to local wisdom. This article aims to identify the potential for acculturation of Islam-Sundanese Muslim Priangan to West Java recognition on the international order. This article used qualitative method by referring to previous studies and literatures. The findings of this article mapped out that referring to the perspective of contemporary diplomacy, the identity of Muslims Priangan of West Java can be used as a promotional instrument, especially with the government's proactive efforts to establish cooperation with foreign entities based on an Islamic vision.

Keywords: Diplomacy; Identity; Muslim Priangan; West Java.

How to Cite: Nurdyawati, T. T. (2022). Identitas Muslim Priangan Sebagai Landasan Promosi Global. *Culture & Society: Journal of Anthropological Research*, 4(1), 10-18.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution Share-Alike 4.0 International License. If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your contributions under the same license as the original. © 2022 by author.

Pendahuluan

Masyarakat Jawa memiliki karakter yang kuat, mereka berpegang pada moralitas harmonisasi kehidupan. Masyarakat Jawa pada dasarnya dikenal dengan sebutan “Wong Jowo” yang mana berarti memiliki kecakapan dalam beradaptasi dengan berbagai bentuk budaya asing, salah satunya adalah Islam. Mereka cenderung memiliki sikap yang sangat kompromis dan adaptif. Sebagai contoh, pada mulanya para Da’i di wilayah Jawa tidak bersikap konfrontatif, sehingga lebih mudah tercipta akulturasi Islam dan akhirnya semakin meluas di pulau Jawa. Hal tersebut kemudian membentuk sikap mutualistik yang masih berlangsung hingga saat ini Jawa Barat terdiri dari tiga budaya yakni Sunda Priangan, Kecirebonan (Jawa), dan Betawi (Arief, 2020). Artikel ini akan mendalami Islam Priangan di Jawa Barat, yang tentunya erat dengan nuansa Tatar Sunda. Hal ini dikarenakan Islam hadir di Tatar Sunda secara turun-temurun sebagai warisan dari para leluhur.

Keunggulan antara Sunda dan Islam mendorong pembentukan identitas baru yaitu sebutan Muslim Priangan. Dalam percakapan sehari-hari istilah "Priangan" sering kali merujuk pada Daerah "Jawa Barat". Baik secara provinsial, maupun corak *societal*. Pada awal abad ke-20 dengan menyempitnya gagasan nasionalisme dan meluasnya modernisasi, komunitas Muslim mendapatkan energi baru untuk melakukan promosi identitas yang lebih spesifik. Konkretnya, seorang Muslim Priangan menjadi identitas baru dengan corak karakteristik yang berbeda dengan Muslim Aceh, Muslim Jawa, Muslim Padang, atau justru Muslim Nusantaranya itu sendiri. Secara empirik, Dinamika yang terjadi di tubuh bagian dalam Muslim Priangan adalah respons terhadap perubahan di tingkat yang lebih besar. Jika di Jawa kita menstereotipkan apa yang disebut "Islam Jawa" hal yang sama akan sulit ditemukan dalam realitas Muslim Priangan. Hubungan dan pergaulan mereka dengan "Islam" tampaknya telah menempati tempat utama tidak hanya aspek spiritual (Amin, 2020).

Artikel ini akan membahas bagaimana identitas Muslim Priangan dapat menjadi keunggulan kompetitif yang dapat meningkatkan daya saing dan promosi Jawa Barat itu sendiri. Keunggulan tersebut tidak semata-mata dalam lingkup nasional yang mengarah pada kompetisi antar-provinsi, tapi justru mengais keseluruhan identitas sebuah daerah sebagai entitas yang juga masif di panggung global. Dalam latar belakang dan penggunaan kacamata ilmu hubungan internasional, upaya promosi dan representasi merupakan bagian dari suatu kerangka diplomasi. Sehingga, artikel ini bertujuan untuk mengeksplanasikan upaya Diplomasi Daerah Jawa Barat dalam membentuk sebuah identitas Muslim Priangan.

Untuk meninjau literatur terdahulu serta menegaskan celah kebaruan, artikel ini membagi ke dalam 3 tipologi. (1) Tipologi mengenai Diplomasi Daerah Jawa Barat, (2). Tipologi mengenai (2) Identitas Muslim Priangan, dan (3) Diplomasi Budaya Jawa Barat. Dalam tipologi pertama, ditemukan berbagai penelitian terdahulu, seperti yang ditulis oleh Suwita Sari (208), Jawahir Thontowi (2009), serta Sylvia Octa Putri (2018). Namun, penulis menemukan bahwa mayoritas terdahulu membahas Diplomasi Jawa Barat dalam kerangka ekonomi yang merujuk pada pembentukan *sister province*. Berbeda dengan hal tersebut, riset ini akan mengeliminasi faktor kaku dan formal, serta mengelaborasi unsur-unsur primordial.

Tipologi kedua, terdapat beberapa penelitian terdahulu seperti artikel "*Ethnicity and Islam in Indonesia*" yang secara substansial mengelaborasi identitas Muslim Priangan oleh seorang penulis Julian Milie dari Monash University, Australia. Terdapat juga Muhsin (2008) yang menyinggung bagaimana Islam di Priangan terbentuk dalam konteks keresidenan. Terakhir, Abdul Syukur (2011), mengenai *Islam dan Identitas: Kasus Etnis Sunda*. Dari ketiga literatur tersebut, penulis menemukan bahwa pola penulisan dengan topik Muslim Priangan masih diindikasikan lekat dengan bahasan politik serta kekuasaan. Belum ada publikasi yang merujuk pada potensi keunggulan sebagai instrumen diplomasi daerah.

Tipologi terakhir mengenai diplomasi budaya, penulis menemukan berbagai literatur terdahulu, seperti: Artikel yang ditulis oleh Nandlia Fauzia, Sri Mashlihah, dan Diah Zaleha mengenai Wisdom Scale Jawa Barat sebagai sebuah faktor keunggulan. Terdapat juga bahasan Sintia Catur (2018) mengenai Diplomasi Kebudayaan dalam Pencak Silat pada UNESCO. Terakhir, literatur dari L. Desriyanti yang secara spesifik menyebutkan budaya Sunda dalam konteks wayang kulit. Dari pemetaan ini, penulis mendapatkan bahwa mayoritas literatur mengambil unsur warisan budaya pada seni atau bela diri. Belum ada singgungan bahwa Diplomasi Budaya dapat direpresentasikan secara primordial dengan identitas kultural.

Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitik. Setelah menentukan tema artikel, penulis mengklasifikasikan literatur rujukan ke dalam 3 tipologi. Penulis memanfaatkan perangkat lunak *Atlas.ti* untuk memudahkan kodifikasi dan memberi sorotan pada informasi yang menambah data bagi penulisan artikel. Mayoritas sumber yang dirujuk oleh penulis berasal dari artikel jurnal, berita, informasi resmi, dan muatan-muatan empirik. Setelah mengumpulkan data yang dikonsiderasi dengan proses triangulasi (penyilangan) sehingga terhindar dari data subjektif, penulis menganalisis dengan teori yang populer dalam Ilmu Hubungan Internasional yakni Diplomasi. Meski demikian, artikel ini secara spesifik berkiblat pada analisis peran serta aktor daerah di dalam jaringan diplomasi kontemporer (meninggalkan perspektif diplomasi tradisional yang selalu berkiblat pada pemerintah pusat). Penulis memaparkan data dan analisis yang ditemukan di dalam sesi Hasil dan Pembahasan.

Hasil dan Pembahasan

Realisasi Fungsi Diplomasi: Promosi Daerah

Diplomasi menjadi salah satu cara negara untuk berkomunikasi. Diplomasi merupakan serangkaian kebijakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengamankan kepentingan yang berhubungan dengan dengan negara lain melalui proses tawar menawar, negosiasi, tindakan non-coercive, serta penggalangan dukungan publik (Ashari, 2020). Ernest Satow menuangkan gagasannya mengenai diplomasi yakni sebagai *'the applications of intelligence and tact to the conduct of official relations between the government of independent states.'* (Freeman, 2010). Satow menjelaskan adanya penggunaan dari kecerdasan dan kebijaksanaan untuk melakukan hubungan resmi antar pemerintah di negara-negara merdeka, yang mana terkadang pelaksanaan tersebut dilakukan antar negara melalui jalan damai. Sementara itu, Ivo Duchacek mengatakan bahwa Diplomasi sebagai praktek dalam pelaksanaan hubungan luar negeri yang dilakukan dengan cara negosiasi (Setiawan, 2016).

Tujuan dari diplomasi diantaranya (Puspitasari, 2015): a) Tujuan ekonomi, yang mana dengan adanya liberalisme dan perdagangan bebas maka dapat memberikan dampak terhadap perekonomian nasional. b) Tujuan budaya. Setiap negara kaya akan keunikan dan keragaman budaya, sehingga hal tersebut dapat memberikan pengaruh bagi negara lain. c) Tujuan politik, yang mana berkenaan dengan perlindungan kebebasan politik dan teritorial suatu negara dan memastikan tujuan-tujuan nasional berjalan dengan baik dan damai. d) Tujuan ideologi, yang mana sebagai power untuk menggerakkan manusia. Saat ini keperluan akan diplomasi semakin berkembang, yang mana terbagi ke dalam dua jenis yakni diplomasi tradisional yang dikenal dengan *first track diplomacy*. Diplomasi tradisional ini cenderung bersifat formal dan hanya dilakukan oleh negara atau hubungan antar pemerintah. Adapun *second track diplomacy*, yang mana dilakukan dengan lebih transparan atau terbuka yang melibatkan tidak hanya pemerintah saja, melainkan aktor lain seperti individu, Multi National Corporations (MNC), dan Organisasi Internasional. Hingga kini, jenis diplomasi semakin beragam seperti diplomasi publik, diplomasi budaya, diplomasi ekonomi, diplomasi olahraga dan lain sebagainya.

Daerah atau *regions* menjadi hirauan dalam Hubungan Internasional. Para sarjana HI secara umum mengakui pentingnya gagasan "daerah" yang mana dalam wacana geopolitik kontemporer menciptakan interaksi di bidang sosial di ranah lokal, nasional, internasional, dan global yang memainkan peran yang cukup sentral. Di negara-negara tertentu "regions" diartikan di antara sisi lokal dan nasional. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, "regions" banyak diartikan sebagai wilayah sub-nasional (mikro) yang ada di suatu negara. Hadirnya konsep daerah menjadi perjuangan politik dalam menghadapi berbagai tantangan global. Setiap daerah tentu memiliki keunikannya dan potensinya masing-masing yang mana hal tersebut menjadi peluang bagi suatu negara untuk mengoptimalkan kepentingannya, mencapai kebermanfaatan bagi warga negara, serta mendorong pertumbuhan dan kemajuan di daerah tersebut.

Pasca Perang Dunia Kedua, negara-negara memperluas intervensi mereka ke sejumlah besar kebijakan perkotaan dan *regions* yang bertujuan untuk mengamankan pembangunan yang seimbang dalam ekonomi nasional dengan masing-masing wilayah memastikan perannya dalam pembagian kerja nasional sesuai dengan prinsip-prinsip keunggulan komparatif. Salah satu tokoh yang membahas mengenai *regions* adalah Michael Keating, yang mana dia menjelaskan bahwa ada empat hal yang mendorong aktor subnasional (daerah) untuk berkontribusi dalam lingkup internasional diantaranya aspek politik, ekonomi, budaya, dan ekonomi. Menyesuaikan dengan kebutuhannya, aktor subnasional akan menempatkan apa yang diperlukan dalam setiap aspeknya. Misalnya dalam aspek ekonomi, aktor sub nasional akan berpartisipasi dalam lingkup internasional untuk mencari target pasar yang sesuai bagi kepentingannya. Adapun dalam aspek budaya, aktor sub nasional (daerah) cenderung akan mempromosikan budaya daerahnya, guna memperoleh peluang kerja sama yang dapat selaras dengan nilai-nilai daerah tersebut, yang tentunya dapat membangun kemajuan di dalam daerah tersebut (Keating, 2001).

Dalam praktik diplomasi, daerah turut memiliki andil dan peran yang cukup kuat dalam lingkup internasional. Sebagai salah satu aktor yang juga memegang peran penting dalam praktik diplomasi, daerah juga dapat memberikan kontribusinya dalam mendukung kepentingan baik dalam ranah domestik maupun internasional. Eksistensi daerah diharapkan dapat mendorong agenda pembangunan berkelanjutan dan membawa nilai-nilai yang tentunya dapat bermanfaat baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Pemerintah daerah memiliki ruang untuk melakukan diplomasi. Dalam upaya pembangunan suatu daerah, daerah sendiri memiliki wewenang untuk menjalin kerja sama internasional. Sebagaimana dalam Undang-Undang RI No.37 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang mana terdapat hukum yang jelas dalam bagi jalannya kerja sama internasional secara relevan atas dasar kepentingan pembangunan daerah. Selain itu, Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai Hubungan Luar Negeri yang mana di dalamnya menyangkut aspek regional dan internasional, baik dilakukan oleh

pemerintah pusat dan daerah maupun lembaga-lembaga lainnya seperti badan usaha, organisasi masyarakat, LSM, dan lembaga negara juga masyarakat (warga negara) (Isnaeni, 2013).

Diplomasi Budaya: Identitas Muslim Priangan Jawa Barat

Aspek budaya memang selaulu menjadi bahan yang menarik untuk dibahas. Diplomasi budaya menjadi hal penting yang mendukung kebijakan luar negeri. Dalam diplomasi budaya terdapat prinsip atau instrumen diantaranya: 1) Persebaran, dimana diplomasi budaya dilakukan dengan menyebarkan budaya juga potensi, gaya hidup, adat istiadat, dan pariwisata sehingga dapat menjadi daya tarik dan membangun audience bagi para pelaku diplomasi. 2) Penerimaan, yang mana ketika diplomasi budaya dilakukan maka akan ada respon atau evaluasi dari masyarakat dan melihat apakah sesuai dan tercapai atau tidak. Adanya respon ini sangat penting dikarenakan dapat menentukan kemajuan dan sebagai tolak ukur dari praktik diplomasi. 3) koeksistensi. Hal ini berkaitan dengan kondisi atau kehidupan yang berdampingan ditengah adanya perbedaan pandangan politik. Pada diplomasi budaya dalam mencapai kepentingan suatu negara maka subjek budaya menjadi tanda pendekatan damai dan lepas dari paksaan dalam mendapat respon internasional.

Diplomasi budaya mengacu pada aspek aspek atau manifestasi utamanya, yang mana didalamnya terkandung unsur-unsur budaya seperti promosi kebudayaan yang dimiliki oleh suatu negara melalui seni dan budaya populer seperti musik, film, literatur, kerajinan, dan edukasi menarik lainnya. Dalam praktik diplomasi budaya, aktor non-negara memainkan peran penting. Dalam jejak historis adanya peningkatan kegiatan ekonomi setelah berakhirnya perang dingin tentu menjadi tantangan baru bagi para penstudi HI. Diplomasi budaya memiliki kekuatan atau keunggulan. Diplomasi budaya adalah koneksi 2 arah bukan paksaan unilateral. Untuk itu, diplomasi budaya membuka ruang dialog yang dapat membangun rasa saling percaya. Hal ini dikarenakan diplomasi budaya dapat meningkatkan wawasan dan pemahaman terhadap masyarakat akan budaya. Dengan adanya diplomasi budaya dapat membantu menyediakan apa yang menarik bagi para penikmatnya. Diplomasi budaya juga dilakukan dalam jangka panjang yang mana dengan demikian hal tersebut dapat menghubungkan pihak-pihak dari kelompok yang berkonflik. Dengan adanya diplomasi budaya maka sebuah negara dapat membangun citranya di arena Internasional.

Sejak munculnya Hubungan Internasional sebagai disiplin ilmu independen di Barat, agama yang semula diperlukan sebagai objek kajian usang yang diabaikan, dipinggirkan, dan bahkan "dilempar" ke dalam teori hubungan internasional versi Barat. Konsep kedaulatan negara dianggap "suci" di bawah Perjanjian Westphalia. Dengan demikian untuk waktu yang lama, agama tidak lagi memiliki tempatnya. Namun selama beberapa dekade terakhir kebangkitan global dalam agama dan tren di seluruh dunia menuju de-religion terutama setelah peristiwa 11 September yang menghancurkan World Trade Center telah mengubah dunia. Ini menggarisbawahi premis lama Samuel Huntington. Premis ini menggambarkan bahwa identitas agama akan menjadi dasar konflik di masa depan sehingga dinamai "Clash of Civilization". Geopolitik global harus dibagi menjadi dua kubu: Barat dan Timur (yang secara khusus mengacu pada Islam). Huntington telah menetapkan bahwa masalah kepercayaan akan menjadi sumber ketidakstabilan global. Tindakan politik dan masalah ekonomi hanyalah peristiwa yang berkontribusi pada krisis. Bahkan Huntington menganggap itulah dasar dari perbedaan keyakinan yang mendasari segalanya (Tucker, 2013).

Tesis Samuel Huntington menjadi tolak ukur bagi para peneliti untuk melihat urgensi identitas di kancah global yang harus diperhitungkan demi menjaga perdamaian. Menurut Huntington Islam sebagai salah satu dari sembilan peradaan esar dan agama yang paling cepat erkemang di zaman sekarang memiliki kesan buruk tentang meningkatnya konflik di Timur Tengah. Dalam hal ini Indonesia khususnya Jawa Barat dengan corak Islam moderatnya dinilai lebih toleran menggunakan bahasa Inggris untuk diplomasi ulama untuk menampilkan Islam dengan baik. Menurut Huntington, perbedaan agama telah menjadi profil konflik yang berbahaya karena telah merenggut banyak nyawa dalam pertumpahan darah. Lebih lanjut, konflik berdasarkan perbedaan agama juga tercatat sebagai krisis terpanjang dalam sejarah dalam berabad-abad (Huntington, 1993).

Dalam kurun waktu pasca Perang Dingin, Aktor dalam hubungan internasional menghadapi isu identitas tentang bagaimana membentuk dan mempertahankan identitas sebagai karakteristik yang melekat. Dalam studi literatur, isu identitas muncul setelah Perang Dingin pasca Uni Soviet runtuh dengan pembuktian bahwa kajian HI telah bertransformasi dari power yang notabene High Politics menjadi konflik intra-nations yang cenderung berpotensi lebih rumit. Sejak saat itu wacana dan kajian tentang identitas telah mulai masif. Dalam hal ini identitas yang muncul juga beragam dan banyak jenisnya. Ini dipengaruhi oleh munculnya aktor-aktor baru pasca perang dingin seperti salah satunya adalah aktor subnegara/daerah (Berenskoetter, 2011). Seiring berjalannya waktu, kajian mengenai identitas semakin hari semakin terimplementasikan (valid dan berkembang). Identitas berperan semakin signifikan dalam

jamaknya aktor Ilmu Hubungan Internasional. Identitas memiliki berbagai jenis, identitas dapat diklasifikasikan berupa agama, suku, etnis, ras dan sebagainya.

Di Indonesia masuknya agama Islam tidak terlepas dari resistensi budaya lokal yang menjadi ciri khas multikultural Indonesia. Indonesia memiliki budaya luhur yang sangat beragam. Masing-masing daerah memiliki karakteristik suku bangsa yang berbeda. Kecenderungan interaksi antara budaya dan agama Islam demikian telah terjadi di berbagai belahan Nusantara (salah satunya di Tatar Sunda). Dalam proses yang panjang dan penuh tantangan Islam telah dianut oleh mayoritas penduduk dunia termasuk Indonesia (yang banyak disapa sebagai Muslim). Namun setelah diadopsi dan diadaptasi ke dalam kerangka yang lebih sempit lagi, wajah Islam yang muncul dalam budaya lokal seringkali tidak disadari oleh banyak orang bahkan disalah artikan oleh banyak orang terutama para penstudi luar negeri yang kurang melihat secara seksama kekayaan diferensiasi kultur nusantara (Ripa'i, 2012).

Dalam konteks kebudayaan priangan, budaya merupakan "kumpulan teks simbolik" sehingga kemampuan manusia untuk membaca teks-teks ini dipandu oleh struktur ritual metaforis kognitif. Agama dan budaya dalam dua unit yang secara bersamaan merupakan sumber dan model tatanan sosial. Jadi, setiap budaya mengandung konsep teori dan metode untuk dipilih sehingga nantinya bisa menyeleksi dan menggaungkan penggabungan tersebut. Rumus dan pedoman yang dapat digunakan untuk menghadapi dunia nyata agar dapat hidup secara organik untuk dapat berkembang kelangsungan hidup rakyatnya serta pedoman etika dan estetika.

Pembentukan budaya sebagai falsafah hidup diwujudkan melalui berbagai lembaga yang juga ada dalam masyarakat Sunda/Priangan. Garis moral etika dan estetika yang ada di setiap budaya adalah inti esensial yang ada di semua budaya. Budaya sebagai pedoman dalam kehidupan setiap orang memungkinkan warga untuk berkomunikasi satu sama lain tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Karena dengan menggunakan budaya yang sama sebagai acuan tindakan setiap komunikator dapat memprediksi apa yang diinginkan oleh agen yang mereka hadapi. Dalam literatur Geertz, Ia memetakan korelasi agama dengan budaya dalam pemetaan sistem. Menurutnya Agama merupakan bagian dari sistem kebudayaan itu sendiri. Sedangkan menurut Geertz budaya didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang meliputi serangkaian aturan rumus rencana dan pedoman yang digunakan orang untuk mengatur tingkah lakunya. Oleh karena itu saya juga dianggap sebagai organisasi makna yang membentuk individu. Korelasi antara Islam dan kebudayaan Sunda Priangan terpetakan dalam pengertian ini. Sunda memiliki panduan nilai-nilai yang dirumuskan menjadi penuntut bagi orang yang beretnis Sunda. Islam hadir secara kooperatif (bukan konfliktual, bukan juga komplementer), dan berjalan beriringan secara paralel dengan kultur Priangan. Dengannya, identitas Muslim Priangan merupakan suatu bentuk integrasi yang unggul dan berkesinambungan.

Sejarah Islam di Jawa Barat

Hadirnya Islam di tanah Jawa tak lepas dari keterlibatan Sembilan Walisongo yang ditandai dengan lahirnya kerajaan Demak, yang mana menjadi simbol dan masa peralihan dari Hindu ke masa Kewalian. Secara kultural, kerajaan Demak dapat menyebarkan Islam melalui keterlibatan dan upaya Walisongo dalam mengimplementasikan agama dan budaya lokal. Dalam dakwahnya, sembilan Wali tersebut menerapkan metode *maudhoh hasanah wa mujadalah billati hiya ahsan*, yang diambil dari Al Qur'an, yang mana mereka berdakwah dengan cara yang halus (Bakri, 2021).

Kekuasaan kerajaan Demak tidak berlangsung lama, pusat kekuasaan kemudian beralih ke Pajang atau Kartasura. Meski demikian dakwah yang sebelumnya dilakukan oleh para Wali tetap dilanjutkan oleh para pimpinan dan ulama Pajang. Setelah dipimpin oleh ulama Pajang masa Mataram Islam yang merupakan perpaduan kultural Islam dengan budaya lokal (Jawa) yang semakin erat sehingga disebut sebagai Islam Kejawen. Pada masa Mataram Islam muncul naskah-naskah keagamaan dan yang ditulis oleh para Shufi serta karya-karya lainnya dari para Wali. Seiring dengan karya-karya yang bermunculan maka penyebaran agama Islam di Jawa diwarnai dengan nuansa akhlaq dan tasawuf (Bakri, 2021).

Keberadaan agama di masyarakat menjadi tak terpisahkan dari realitas sosial. Agama memiliki pengaruh yang besar dalam menciptakan perubahan sosial. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang sangat erat dengan nilai-nilai agama Islam. Sebagian besar masyarakat di Jawa Barat saat ini telah memeluk agama Islam. Pada mulanya, Islam masuk ke Jawa Barat dapat kita pahami dari tiga wilayah yang menjadi wilayah sentral yakni Cirebon, Banten, dan Sunda Kelapa. Cirebon dikenal sebagai kota pelabuhan, yang mana terdapat muara-muara sungai yang menjadi jalan kegiatan pelayaran dan perdagangan. Cirebon juga dikenal sebagai wilayah yang menjadi pengikut kerajaan Sunda. Adanya jalur pelayaran tersebut tentu memudahkan para saudagar dari Arab, India, Malaka, Parsi, Jawa Timur, Madura untuk berdagang dan aktivitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Mereka mengunjungi Pasar Pasambangan dan Pelabuhan Muhara Jati yang mana mereka dapat bersosialisasi dengan masyarakat setempat dan mulai mengenal agama islam (Muhsin, 2010). Cirebon menjadi salah satu kota

yang dikenal sebagai pusat budaya dan sastra pesisir, juga pusat penyebaran Islam di Jawa Barat. Naskah-naskah klasik, terutama tentang Islam menjadi salah satu bukti penyebaran Islam di Cirebon (Firmanto, 2015). Jawa Barat terdiri dari tiga budaya yakni Sunda Priangan, Kecirebonan (dengan bahasa Jawa), dan Betawi (Arief, 2020).

Selain Cirebon, Banten juga menjadi wilayah dengan pelabuhan yang letaknya sangat strategis di kawasan Selat Sunda yang juga menjadi jalur pelayaran dan perdagangan di bagian barat dan selatan Sumatera. Banten pernah dikunjungi oleh Syarif Hidayatullah saat beliau kembali dari Arab. Pada saat itu, agama Islam telah ada, meskipun masih menjadi bagian dari Kerajaan Hindu Pajajaran. Setelah itu, tidak sedikit masyarakat Banten yang memeluk agama Islam dengan bantuan Demak dan Cirebon, hingga kemudian pada 1513, Banten menjadi pelabuhan dengan aktivitas perdagangan milik Kerajaan Sunda. Adapun Sunda Kelapa yang mulai dikenalkan pada 1513 oleh Tome Pires, De Barros pada 1527, dan Cornelis de Houtman pada 1598. Menurut mereka Sunda Kelapa adalah kota pelabuhan yang ramai dikunjungi para pedagang. Awalnya pelabuhan tersebut dikuasai oleh pasukan Islam dari Cirebon dan Demak, kemudian Sunda Kelapa berganti nama menjadi Jayakarta.

Pada awal abad ke-14, diperkirakan sudah ada orang yang menganut agama Islam yang tinggal di Jawa Barat. Menurut sejarah, penganut Islam yang pertama datang ke Jawa Barat adalah Haji Purwa pada 1250. Haji Purwa memeluk Islam dengan dibantu oleh seorang saudagar Arab. Beliau juga mengislamkan adiknya yang saat itu sedang berkuasa di Tatar Sunda. Kemudian muncul Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Idhofi yang berasal dari Arab dan tokoh-tokoh lainnya. Masyarakat Jawa Barat yakni Cirebon telah beragama Islam pada 1513 (Muhsin, 2010).

Sejarah mencatat dari Babad Cirebon menyatakan bahwa keberadaan Islam di Tatar Sunda Islam dijadikan pedoman dalam kehidupan masyarakat Jawa Barat. Nilai-nilai dan tradisi Islam diaplikasikan sebagai tuntunan dalam kehidupan. Seiring perkembangan zaman, di Jawa Barat mulai didirikan pesantren-pesantren yang menjadi salah satu lembaga pendidikan. Tiap-tiap pesantren yang didirikan mencetak santri-santri yang membanggakan, Jawa Barat pun semakin memperkuat nilai-nilai Islam dengan kekhasan budaya Tatar Sunda. Dikutip dari Carita Purwaka Caruban menyebutkan bahwa Sunan Gunung Jati berhasil mengislamkan daerah-daerah yang ada di Tatar Sunda diantaranya Cirebon, Kuningan, Talaga Luragung, Kuningan, Indralaya, Bantar, dan Inmbanganten, Sementara daerah Galuh dan Sumedang diislamkan oleh Cirebon. Penyebaran Islam ke Jawa Barat khususnya Sunda Priangan, menjadi sarana akulturasi budaya Sunda dengan Islam. Islam di Tatar Sunda terbagi atas dua bagian penyebaran Islam yakni bagian Barat yang terdiri dari Jakarta, Banten Selatan, Bogor, dan Sukabumi. Sedangkan bagian Timur meliputi Cirebon dan daerah-daerah penyebarannya seperti Majalengka, Cirebon, Cianjur, Indramayu, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, dan Bandung (Sujati, 2019).

Dalam catatan sejarah, Islam pada umumnya masuk ke Tatar-Sunda seiring masuknya Islam ke Jawa. Seperti di daerah lain di Jawa, puncak kesuksesan dakwah Islam adalah pada masa Walisongo. Di Tatar-Sunda, mereka menjadi penyebar agama Islam yang terkenal. Proses "Islamisasi" Tatar-Sunda tercatat lebih damai. Provinsi Jawa Barat sebagai Provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia (50 juta) memiliki 46 juta masyarakat yang beragama muslim. Hal ini menjadi titik urgensi mengapa Islam dapat dengan mudahnya lekat/beriringan dengan kebudayaan Sunda. (Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, 2021).

Falsafah Islam dan Sunda

Untuk memahami seberapa lekat hubungan antara Islam dan Sunda, perlu ditelusuri landasan filosofi yang dianut oleh Suku Sunda. Jika falsafah hidup yang dianut terbukti kuat dipengaruhi oleh Islam, maka hampir dapat dipastikan bahwa Islam telah merambah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya masyarakat Sunda. Penjelajahan falsafah hidup tentunya harus dimulai dari kehidupan sehari-hari. Jejak budaya dalam kehidupan sehari-hari akan memberikan banyak informasi tentang bagaimana individu bersuku Sunda mendefinisikan hidup mereka dan bagaimana mereka seharusnya hidup. Salah satu jejak budaya yang dapat menggambarkan falsafah hidup yang dianut oleh masyarakat Sunda adalah peribahasa dan babasan, yang artinya peribahasa dan warisan peribahasa yang hidup di masyarakat.

Di balik terminologi peribahasa terdapat cara pandangan mengenai dunia. Pandangan hidup ini merupakan kerangka dasar bagi masyarakat untuk mempersepsikan dan memaknai berbagai realitas yang dihadapinya. Di sinilah celah penemuan akan seberapa besar korelasi Islam dengan Sunda. Dari 500+ peribahasa Sunda, terdapat 16 yang susunan katanya mengadopsi peristilahan dalam Agama Islam. Di antaranya ialah: Jauh ka Bedug, Puasa manggih Lebaran, Kokoro manggih Mulud, dan sebagainya. (Rosjid, 2010, 39). Meski secara persentase tidak begitu banyak peribahasa yang mengambil peristilahan dalam Islam, tetapi urgensi ini menimbulkan bukti empiris bahwa jika diteliti lebih lanjut: Peribahasa Sunda mengandung nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran Islam.

Hal ini yang kemudian mendorong banyaknya ahli yang memberi pendefinisian bahwa “Islam adalah Sunda”, “Sunda adalah Islam”. Secara fenomenologi, tidak sedikit para penstudi yang mengatakan bahwa sesungguhnya antara Islam dengan Sunda tidak dapat dipisahkan. Ajaran Islam tidak perlu merinci Qur’an atau hadits, melainkan juga secara eksplisit membentuk gaya hidup masyarakat Sunda. Budaya hidup masyarakat Sunda merupakan budaya dengan sentuhan Islam yang sangat kental. Hal ini karena kebudayaan Sunda telah mengalami Islamisasi yang sangat intensif dengan respons keterbukaan masyarakat yang positif.

Etnis Sunda juga mencerminkan karakter ramah dan relevan dengan Islam yang inklusif, damai, dan ramah. Dari segi filosofis Bahasa Sunda memiliki nilai-nilai yang baik seperti silih asah, silih asih, silih asuh, someah hade ka semah. Nilai tersebut memiliki makna baik untuk saling mengasihi, saling menghargai, saling membantu. Bahkan salah satu karakter yang menjadi karakteristik suku Sunda adalah keramahannya, membuat pihak-pihak lain merasa nyaman dengan perlakuan positifnya. Hal ini sesuai dengan ajaran agama. Filsafat Sunda memiliki validitas universal dan modern (Dewi & Bunyamin, 2020).

Rekognisi Muslim Priangan di Ranah Global

Jawa Barat, merujuk pada daerah yang merupakan terdiri dari 2 unsur: kemasyarakatan, kebudayaan (suku bangsa) dan pemerintahan, memiliki visi dinamis sesuai dengan keadaan masyarakat dan kerangka kepemimpinan terpilih di periode tertentu. Dalam periode terkini, Gubernur terpilih Jawa Barat yakni Ridwan Kamil beserta UU Ruzhanul Ulum merumuskan program dan objektifnya dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Di dalamnya, dimuat misi-misi yang masif dan tinggi standar. Salah satu di antaranya ialah tujuan untuk rekognisi budaya Jawa Barat seluas-luasnya tanpa batas. Budaya dalam hal ini berkonteks luas, dari seni seperti tarian, musik, hingga identitas keagamaan. Sama seperti isu pendidikan, budaya dimasukkan menjadi Prioritas II poin nomor satu.

Komitmen Provinsi Jawa Barat terhadap promosi budaya ke luar batas provinsi (baik nasional hingga level internasional) menjadi input yang kemudian mempengaruhi luaran bentuk diplomasi. Komitmen ini ditegaskan dengan kerangka pendanaan yang akan menopang segala bentuk promosi bagi budaya. Untuk mencapai tujuan pembangunan dan melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan provinsi, dialokasikan anggaran untuk biaya langsung dan tidak langsung sesuai dengan peraturan yang telah dirumuskan. Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah mencanangkan program pemantauan anggaran dengan jargon “Money follow programme” yang memperhatikan prioritas sesuai dengan isu dan kondisi tahun mendatang. Hal ini kemudian mendorong pengembangan beberapa program untuk pengenalan budaya ke panggung internasional yang kemudian akan diperdalam pada poin 3 pembahasan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pembinaan Kebudayaan membawa dorongan dalam upaya perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pemajuan kebudayaan di Jawa Barat. Jawa Barat memiliki budaya yang unik menarik dan beragam. Namun dalam kehidupan sosial aktualisasi budaya lokal masih menghadapi kendala yaitu lemahnya perlindungan budaya lokal, meremehkan budaya lokal terutama dalam konteks keunggulan muslim priangan, kurang optimalnya promosi budaya lokal Jawa Barat dan kuatnya pengaruh budaya asing pada pelestarian budaya lokal. Untuk mengatasi masalah ini {pemerintah Provinsi Jawa Barat membentuk program Budaya Juara dengan fokus pada upaya mempromosikan budaya Jawa Barat termasuk tradisi lisan; manuskrip; pengetahuan dan falsafah tradisional; agama; dan warisan budaya (RPJMD, 2018).

Kepentingan Jawa Barat untuk mempromosikan budaya ini juga terintegrasi dengan kepentingan visi Pemerintah Provinsi kerangka 2018-2023 yaitu Jawa Barat juara lahir dan batin. Asas batin di sini dimaksudkan pada sektor keagamaan berbasis religik. Jawa Barat sebagai provinsi mayoritas muslim dengan lima belas ribu pondok pesantren yang ada di Jawa Barat, 4.8 juta santri Jawa Barat, dari 46 dari 50 juta masyarakat beragama Islam, dengan potensi ini Pemerintah Provinsi merasa perlu untuk mengibarkan bendera identitas Islam di ranah luas (termasuk internasional).

Dalam aspek keagamaan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memiliki berbagai kepentingan realisasi misi yang telah dikukuhkan sebagai pemaksimalan identitas Islam di Jawa Barat, antara lain: Program Pesantren Juara yang merupakan upaya untuk pemberdayaan pondok pesantren sebagai institusi pendidikan Islam yang signifikan di Jawa Barat. Agar mandiri secara ekonomi dan memiliki kualitas penyampaian ilmu islam dengan baik. Hal yang menjadi asas benang merah bagi setiap visi Jawa Barat adalah pembentukkan tujuan untuk peningkatan daya saing. Competitiveness yang dimaksud dalam hal ini adalah dalam lingkup yang luas mencakup internasional.

Selain daya saing sumber daya manusia bidang agama agar tercapai keunggulan di tingkat internasional, Pemerintah juga memiliki kepentingan pembangunan untuk merealisasikan misi Ulama Juara. Dalam salah satu programnya adalah English for Ulama yang memiliki sasaran untuk mempromosikan citra Muslim Priangan yang toleran dan damai ke negeri Inggris yang masih memiliki

indeks islamophobia yang tinggi. Dalam beberapa pernyataan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, program ini secara gamblang diidentifikasi sebagai diplomasi dakwah Jawa Barat.

Dalam perumusan strategi peningkatan daerah demi diplomasi yang lebih kuat, Jawa Barat hirau dengan 5 isu strategis yang merupakan upaya untuk pemetaan keunggulan Jawa Barat, yaitu: 1) Empati Isu internal yang menjadi hambatan bagi pembangunan Jawa Barat seperti birokrasi, kemiskinan, daya saing SDM, dan 2) Dinamika internasional. Dinamika internasional dikonsiderasi oleh Jawa Barat sebagai subnegara dalam menentukan kebijakan. Hal ini mencakup isu politik tinggi dan politik rendah. Jawa Barat memosisikan dirinya untuk bersikap adaptif-proaktif di antara pergolakan panggung internasional. Tatatanan global yang dimaksudkan adalah segala entitas di luar batas Negara Republik Indonesia seperti regional ASEAN maupun tahapan lebih general yakni PBB.

Potensi dan Keunggulan Identitas Muslim Priangan

Setiap daerah tentu memiliki keunikan dan potensinya masing masing, yang mana hal tersebut juga dimiliki dan menjadi kekhasan dari muslim priangan. Berbicara Islam di Priangan tentu menjadi hal yang menarik untuk dibahas, nilai-nilai Islam yang dipadukan dengan budaya di Tatar Sunda, sehingga nilai dan budaya tersebut menjadi erat dan tak terpisahkan dalam realitas sosial. Dalam agama Islam, terdapat dua aspek penghayatan keagamaan yakni eksoterik atau zhahir, yang mana cenderung berorientasi pada aturan-aturan dan norma-norma agama. Adapun esoterik (batin), yang mana menitikberatkan pada tujuan beragama. Dalam Islam, kita hendaknya menjalin hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala (hablum minallah) dan hubungan baik dengan manusia (hablum minannas). Selain itu, sebagaimana dalam Al Qur'an kita mengenal istilah amar ma'ruf nahyi munkar, yang mana Allah SWT menyeru kita untuk melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Robert W. Hefner seorang Direktur *Institute on Culture, Religion, and Word Affairs* asal Boston University, mengatakan bahwa Islam di Indonesia memiliki keunggulan atau keistimewaan yang mengagumkan antara lain (Hefner, 2018): 1) terdapat pendidikan madrasah yang terbuka terhadap pembaruan pandangan, Islam sangat inovatif, dan Islam tidak konservatif. 2) adanya organisasi Islam yang didirikan telah berkontribusi besar dalam memperbaiki dan membentuk karakter masyarakat. 3) arah Islam sangat adaptif. Dengan nilai-nilai agama yang senantiasa dipegang, muslim Priangan hidup dengan makmur dan rukun. Semakin canggihnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat mereka terus berinovasi dengan tidak menghilangkan nilai-nilai yang dianut.

Keistimewaan Islam juga dapat kita cermati dari masyarakat Muslim Priangan yang turut memegang erat nilai-nilai Islam sebagai pedoman hidupnya. Nilai-nilai Islam yang dipadukan dengan budaya Sunda menjadi keunikan tersendiri bagi masyarakat Priangan. Tidak sedikit mereka para pemimpin Muslim Priangan yang sukses di berbagai bidang dan membawa banyak perubahan positif bagi kehidupan masyarakat Priangan, Jawa Barat. Hal tersebut juga membuat Jawa Barat dikenal sebagai provinsi yang mencetak generasi-generasi yang berkualitas, yang mana dapat dibuktikan dengan sistem pendidikan Islam seperti pesantren-pesantren yang banyak ditemui di wilayah Priangan.

Masyarakat Priangan lekat dengan kehidupan bernuansa Islami yang masih ada hingga saat ini, ada beberapa kebiasaan yang menjadi kekhasan dari Muslim Priangan dengan nuansa Sunda misalnya pada saat Aqiqah atau penyembelihan hewan domba atau kambing yang dilaksanakan pada hari ke tujuh lahirnya seorang anak dan prosei potong rambut pada bayi sambil mengucapkan sholawat sebagai bentuk rasa syukur. Adapun tradisi lainnya seperti pernikahan, kematian, kewarisan, dan muamalah yang mana diatur berdasarkan ajaran Islam dan tradisi Sunda Priangan. Selain itu, adapun istilah dalam adat Sunda yang masih dipegang hingga saat ini adalah "Pamali" yang mana salah satu bentuk wejangan dari para orang tua ketika menasehati anaknya untuk tidak melakukan sesuatu yang menyimpang. "Pamali" berarti ada hal yang tidak boleh kita lakukan yang dipercaya dan dikhawatirkan akan mencelakakan kita. Hingga saat ini, kata "pamali" masih sering digunakan sebagai bentuk peringatan atau perhatian terhadap tindakan yang dilakukan. Dalam kata "pamali" juga terselip nilai-nilai dakwah, misalnya "*Ulah diuk dina meja, matak loba hutang*" (Jangan duduk di meja, karena akan membuat kita banyak utang) maka nilai dakwah yang bisa diambil adalah duduk itu harus pada tempatnya, hal ini berkaitan dengan etika dan adab.

Kesimpulan

Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan masyarakat yang hidup dengan memegang ajaran Islam. Dengan komitmen Jawa Barat untuk mengimplementasikan nilai Islam dengan perpaduan budaya Sunda tentu menjadi aset yang perlu terus ditingkatkan. Kekhasan Jawa Barat dengan program-program yang diusung dapat menjadi jembatan dalam menjalin kerja sama dan dapat hadir di arena internasional. Potensi dan keunggulan Jawa Barat melalui nilai-nilai dan tradisi yang dianut mampu bersaing dan

mendukung perubahan yang baik untuk Jawa Barat. Dengan kerja sama yang berjalan dengan sinergis ini diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Barat.

Daftar Rujukan

- Arief, F. R. (2020). Menyoal Provinsi Sunda, Tatar Sunda atau Pasundan. <https://www.timesindonesia.co.id/read/news/>
- Ashari, K. (2020). Kamus Hubungan Internasional dan Diplomasi (1st ed.). PT. Gramedia Pustaka Utama. <https://ebooks.gramedia.com/id/buku/kamus-hubungan-internasional-dan-diplomas>
- Amin. (2019). Islam Priangan: Pergulatan Identitas dan Politik Kekuasaan. Academia Edu.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. (2021). Jumlah Penduduk dan Agama Yang Dianut, 2015-2020. Jabar.BPS.go.id. <https://jabar.bps.go.id/subject/108/agama.html#subjekViewTab3>
- Bakri, S. (2021). Kebudayaan Islam Bercorak Jawa (Adaptasi Islam dalam Kebudayaan Jawa). *Dinamika Academic Journal of Islamic Studies*, 1(1), 1-10.
- Berenskoetter, F. (2011, January). Identity in International Relations. *Conceptualizing World Politics: Identity, Agency, Temporality*, 1(1).
- Dewi, S. M., & Bunyamin, M. (2020). The Value of “Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh” in Conflict Resolution Education at Elementary Schools. Conference: International Conference on Progressive Education (ICOPE 2019). 10.2991/assehr.k.200323.130
- Firmanto, A. (2015). Historiografi Islam Cirebon (Kajian Manuskrip Sejarah Islam Cirebon). *Lektur Keagamaan*, 13(1), 31–58.
- Freeman, J. (2010). The Diplomat’s Dictionary. <https://www.usip.org/publications/2010/05/diplomats-dictionary>
- Hefner, R. W. (2018). Routledge Handbook of Contemporary of Indonesia. British Library Cataloguing. https://issuu.com/nasrulrizal2/docs/hefner_2018_routledge_handbook_of
- Isnaeni, N. (2013). Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional untuk Pembangunan Berkelanjutan. *Global & Strategis*, 2(1).
- Keating, M. (2001). Michael Keating Governing cities and regions: territorial restructuring in a global age.
- Muhsin, M. (2010). Penyebaran Agama Islam di Jawa Barat. Universitas Padjajaran.
- Ripa'i, A. (2012, Desember). Dialektika Islam Dan Budaya Sunda (Studi Tentang Sistem Kepercayaan dan Praktik Adat pada Komunitas Masyarakat di Desa Nunuk Baru Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Jawa Barat). *Holistik*, 13(2).
- Rosjid, A. (2010). *Mencari Sosok Manusia Sunda*. Jakarta: Pustaka Jaya Jakarta.
- Vignoles, V. L. (2017). *Identity: Personal AND Social*. Oxford Handbook of Personality and Social Psychology.
- Huntington, S. P. (1993). *The Clash of Civilization*. Foreign Affairs.
- Tucker, T. (2013). Huntington and Post-Cold War Paradigms: If Not the Clash of Civilizations, What? www.Er-Info.Com.
- Puspitasari, W. (2015). Diplomasi Budaya Uni Eropa Melalui Penyelenggaraan Festival Film Eropa (Europe on Screen) di Indonesia.
- Setiawan, A. (2016). Teori dan Praktik Diplomasi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Sujati, B. (2019). Tradisi Budaya Masyarakat Islam di Tatar Sunda (Jawa Barat). *Journal of Ushuluddin, Adab, and Dakwah Studies*, 1(1), 39–42.